

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Program WaterWorX merupakan program kerja sama pembangunan internasional jangka panjang yang sudah beroperasi sejak 2017 dan ditargetkan hingga 2030 dengan misi memperkuat kapasitas utilitas air di negara berkembang melalui pendekatan *peer-to-peer* antaroperator air lintas negara menggunakan mekanisme *Water Operator Partnership* (WOP). Program ini beroperasi dalam kerangka *Global Water Operators' Partnership Alliance* (GWOPA) di bawah naungan UN-Habitat. Program ini juga diimplementasikan oleh lebih dari sepuluh operator air Belanda dengan dukungan pendanaan Kementerian Luar Negeri Belanda. Sejak diluncurkan pada Hari Air Sedunia tahun 2017 di Den Haag, WaterWorX telah melewati dua fase implementasi. Fase pertama (2017–2021) membangun kemitraan dengan 39 utilitas air di Afrika dan Asia, sementara fase kedua (2022–2026) menargetkan tambahan 3,5 juta orang dengan memperdalam kemitraan yang sudah terjalin. Secara keseluruhan, dari 2017 hingga 2023, program ini telah menjangkau 4,3 juta orang melalui kemitraan dengan 40 utilitas air di 15 negara (Verheij, n.d.; WaterWorX, n.d.).

Salah satu implementasi Program WaterWorX yang paling relevan untuk dikaji adalah keterlibatannya di Indonesia, khususnya di Kota Semarang sejak tahun 2019. Di Indonesia, WaterWorX dijalankan melalui skema WOP pada dua daerah, yaitu Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang yang bermitra dengan VEI Dutch Water Operator serta Perumda Air Minum Tirta Negoro

Kabupaten Sragen yang bermitra dengan Oasen (WaterWorX, 2025). Melalui mekanisme WOP, PDAM Tirta Moedal selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Semarang menjalin kerja sama langsung dengan VEI Dutch Water Operator.

Keterlibatan PDAM Tirta Moedal dalam Program WaterWorX tidak muncul dalam ruang kosong, melainkan didorong oleh kondisi struktural pengelolaan air di Kota Semarang yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme domestik semata. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah pesisir, Kota Semarang menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan kapasitas layanan air perpipaan yang mendorong ketergantungan masyarakat dan sektor industri pada air tanah. Pada saat kerja sama diinisiasi, PDAM Tirta Moedal baru melayani sekitar 40% rumah tangga di wilayah kota dengan tingkat non-revenue water (NRW) di kisaran 40%, suatu kondisi inefisiensi operasional yang signifikan (de Jong, n.d. A). Ketergantungan pada air tanah yang tinggi ini berdampak langsung pada penurunan muka tanah di wilayah pesisir yang mencapai 8–12 cm per tahun, memperburuk risiko banjir rob dan intrusi air laut (Tirta, 2020; Sarah, 2022). Berbagai upaya domestik yang telah dilakukan, mulai dari pembangunan SPAM Jatibarang hingga pengetatan regulasi penggunaan air tanah, masih menghadapi kendala struktural yang mendasar akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antarlembaga (Megarani, 2022; Arifin, 2025). Kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong PDAM Tirta Moedal untuk menempuh jalur kerja sama internasional secara langsung melalui Program WaterWorX.

Dalam kerangka Hubungan Internasional, pola keterlibatan PDAM Tirta Moedal dalam Program WaterWorX mencerminkan fenomena paradiplomasi, yaitu keterlibatan langsung pemerintah subnasional dalam hubungan internasional tanpa melalui pemerintah pusat sebagai perantara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mekanisme kerja sama pembangunan internasional melalui Program WaterWorX dalam memperkuat kapasitas pengelolaan air di Kota Semarang.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertulis diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan menjadi “Bagaimana mekanisme kerja sama pembangunan internasional melalui Program WaterWorX dalam memperkuat kapasitas pengelolaan air di Kota Semarang?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme kerja sama pembangunan internasional melalui Program WaterWorX dalam memperkuat kapasitas pengelolaan air di Kota Semarang.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kerja sama pembangunan internasional melalui Program

WaterWorX sebagai bentuk paradiplomasi yang dijalankan oleh PDAM Tirta Moedal sebagai instrumen pemerintah subnasional Kota Semarang, melalui identifikasi motif, institusionalisasi, dan konsekuensi paradiplomasi dalam penguatan kapasitas pengelolaan air di Kota Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami fenomena paradiplomasi yang dijalankan oleh aktor subnasional di tingkat lokal. Penelitian ini menempatkan Program WaterWorX sebagai bentuk *global paradiplomacy* yang dijalankan PDAM Tirta Moedal sebagai instrumen Pemerintah Kota Semarang dalam menjalin hubungan internasional langsung dengan VEI Dutch Water Operator tanpa melalui pemerintah pusat sebagai perantara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi studi-studi selanjutnya yang membahas keterkaitan antara paradiplomasi, tata kelola air, dan pembangunan perkotaan di negara berkembang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan refleksi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam memahami potensi paradiplomasi sebagai

instrumen penguatan kapasitas pengelolaan air di tingkat lokal. Dengan menganalisis Program WaterWorX sebagai bentuk paradiplomasi, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah subnasional tidak harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme domestik atau intervensi pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan fungsional yang bersifat *low politics*. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran kebijakan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan air, khususnya dalam memanfaatkan jalur paradiplomasi sebagai bagian dari tata kelola air perkotaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Kajian Literatur

Artikel pertama yang menjadi dasar kajian penulis adalah tulisan yang membahas kerja sama pembangunan internasional dalam pengelolaan sumber daya air. Artikel tersebut berjudul “*Kerja Sama Indonesia–Amerika Serikat melalui Program USAID IUWASH Tahun 2020–2024 Terkait Akses Air Bersih dalam Bingkai SDGs*” karya Baitanu et al. (2025). Artikel ini menjelaskan bahwa terbatasnya akses air bersih dan sanitasi di Indonesia mendorong terbentuknya kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat melalui Program USAID IUWASH. Dalam analisisnya, Baitanu et al. (2025) menempatkan program IUWASH sebagai bentuk kerja Sama pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kapasitas

kelembagaan, peningkatan tata kelola sektor air, serta adopsi standar pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG) 6. Studi ini menunjukkan bagaimana institusi internasional berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan transfer sumber daya, pengetahuan, dan standar global ke dalam lingkup nasional. Selain itu, dari artikel tersebut juga memperlihatkan bagaimana agenda global pembangunan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan implementasi di tingkat nasional.

Artikel kedua dalam dasar kajian ini juga masih berkaitan dengan artikel sebelumnya mengenai pengelolaan air, di mana Wiedilaksono et al. (2024) dalam artikelnya yang berjudul “*The Role of Water Operator Partnership in Accelerating Adoption of New Working Process for Non-Revenue Water Reduction*” membahas bentuk kerja sama internasional yang lebih teknis melalui mekanisme *Water Operator Partnership* (WOP). Artikel ini berfokus pada aspek teknis khususnya dalam peningkatan kinerja operasional melalui reduksi *Non-Revenue Water* (NRW). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama lintas negara dapat berlangsung melalui mekanisme teknis berbasis *capacity building* dan *peer-to-peer learning*. Kendati demikian, artikel ini lebih menitikberatkan aspek operasional dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme kerja sama tersebut dapat dipahami dalam kerangka hubungan internasional.

Adapun artikel lainnya yaitu tulisan Pramana (2017) yang berjudul *“Kerja Sama antara Bandung Indonesia dan Seoul Korea Selatan (Studi Kasus Little Bandung di Hongdae Seoul)”* ini membahas kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Seoul di sektor ekonomi kreatif. Pramana (2017) dalam artikelnya menekankan bahwa kerja sama lintas negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi juga bisa dijalankan oleh aktor subnasional lewat kesepakatan dan program konkret dengan mitra luar negeri. Program Little Bandung dipahami sebagai implementasi kerja sama internasional yang bertujuan memperluas akses pasar bagi produk UMKM Bandung sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi lokal di tingkat global.

Kerja sama internasional tidak harus selalu melibatkan negara atau pemerintah sebagai aktor utama, melainkan dapat dijalankan oleh aktor non-negara bahkan dalam lingkup yang lebih kecil seperti sekolah. Talakua et al. (2016) dalam tulisannya yang berjudul *“Analisis kerja sama Aktor-Aktor Non Pemerintah dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan”* menguraikan kerja sama antara SMA Kristen 1 Salatiga dengan Lembaga Kursus Bahasa Mandarin “Sha Hua” sebagai bentuk kolaborasi lintas negara di bidang pendidikan. Bentuk kerja sama ini mencakup program pembelajaran bahasa Mandarin, pertukaran metode mengajar, dan peningkatan kompetensi guru maupun siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa kolaborasi ini cukup efektif dalam meningkatkan kualitas SDM, terutama dalam kemampuan berbahasa asing dan

pemahaman lintas budaya, meskipun negara tidak terlibat langsung sebagai aktor utama.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa berbagai penelitian telah membahas kerja sama internasional dalam pengelolaan air, baik dalam bentuk kemitraan antarnegara, program bantuan internasional, maupun kolaborasi teknis lintas aktor. Beberapa penelitian menempatkan kerja sama internasional sebagai instrumen penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola air, terutama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor air bersih. Kajian lain juga menunjukkan bahwa kerja sama lintas negara tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi bisa melibatkan aktor subnasional dan non-negara melalui program dan kemitraan di level lokal.

Apabila dianalisis secara mendalam, kajian-kajian tersebut sebagian besar masih berfokus pada kerja sama internasional dalam konteks nasional atau sektoral tertentu, dan belum mengkaji secara spesifik bagaimana Program WaterWorX dapat dipahami dalam kerangka paradiplomasi sebagai bentuk keterlibatan internasional dari aktor subnasional di tingkat lokal. Penelitian mengenai WOP, termasuk Wiedilaksono et al. (2024) yang membahas WaterWorX di Indonesia, lebih menekankan pada aspek teknis dan operasional, sementara dimensi paradiplomasi dari keterlibatan operator air daerah dalam hubungan internasional masih jarang dibahas dalam kerangka Hubungan

Internasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji proses paradiplomasi melalui Program WaterWorX dalam memperkuat kapasitas pengelolaan air di Kota Semarang.

1.5.2. Paradiplomasi

Paradiplomasi secara umum merujuk pada keterlibatan unit-unit konstituen atau pemerintah subnasional dari suatu negara dalam urusan internasional. Kuznetsov (2015) mendefinisikan paradiplomasi sebagai bentuk komunikasi politik untuk mencapai manfaat ekonomi, budaya, politik, atau jenis manfaat lainnya yang terdiri atas tindakan mandiri pemerintah regional dengan aktor-aktor pemerintahan dan non-pemerintahan asing. Berbeda dengan diplomasi konvensional yang dijalankan oleh pemerintah pusat sebagai representasi tunggal kepentingan nasional, paradiplomasi tidak bertujuan merepresentasikan kepentingan umum secara menyeluruh. Pemerintah regional tidak memiliki pemerintahan berdaulat yang mampu menetapkan "kepentingan nasional" secara tunggal dan koheren, sehingga aktivitas mereka di arena internasional lebih bersifat sektoral dan berorientasi pada kepentingan spesifik wilayah masing-masing (Kuznetsov, 2015).

Pelaku utama dari paradiplomasi adalah pemerintah subnasional atau yang disebut sebagai *constituent units*, yaitu satuan teritorial dan administratif pada tingkatan di bawah pemerintah pusat, baik dalam sistem federal maupun unitari. Paradiplomasi tidak terbatas pada negara-negara

federal seperti Kanada, Amerika Serikat, atau Jerman, melainkan berlaku pula bagi negara-negara kesatuan seperti Jepang. Perkembangan studi paradiplomasi pada dekade 2000-an bahkan menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara demokratis, sebagaimana dibuktikan oleh keterlibatan provinsi-provinsi pesisir Tiongkok dalam hubungan internasional. Dengan demikian, pemerintah subnasional memiliki kedudukan yang ambigu, yakni berada di antara aktor negara dan non-negara, karena mereka merupakan bagian dari struktur kekuasaan negara sekaligus bertindak secara mandiri di panggung internasional (Kuznetsov, 2015).

Dalam hal tipologi aktivitasnya, Duchacek sebagaimana dibahas oleh Kuznetsov (2015) mengklasifikasikan paradiplomasi ke dalam empat bentuk: *transborder paradiplomacy*, *transregional paradiplomacy*, *global paradiplomacy*, dan *protodiplomacy*. *Transborder paradiplomacy* mencakup kontak formal maupun informal antarpemerintah subnasional yang berbagi batas geografis, yang sebagian besar didorong oleh kedekatan wilayah dan kesamaan persoalan yang dihadapi. *Transregional paradiplomacy* menggambarkan hubungan antarpemerintah subnasional yang tidak berbatasan langsung secara geografis. Sementara itu, *global paradiplomacy* melibatkan kontak fungsional-politis dengan negara-negara jauh yang membawa pemerintah subnasional ke dalam hubungan tidak hanya dengan pusat-pusat perdagangan dan industri di benua lain, tetapi juga dengan berbagai cabang atau lembaga pemerintah asing. Adapun

protodiplomacy merujuk pada inisiatif dan aktivitas pemerintah subnasional di luar negeri yang mengandung pesan separatistis, yakni ketika tindakan internasional suatu entitas subnasional diarahkan untuk memperoleh pengakuan kedaulatan atau otonomi yang lebih penuh dari komunitas internasional.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Motif Paradiplomasi

Motif paradiplomasi merujuk pada alasan mendasar yang mendorong pemerintah subnasional untuk terlibat dalam hubungan internasional. Terdapat empat motif utama paradiplomasi yaitu ekonomi, politik, budaya, dan *cross-border housekeeping*. Dalam penelitian ini, motif paradiplomasi yang digunakan adalah *cross-border housekeeping*. Motif ini dipahami sebagai kebutuhan pemerintah subnasional untuk menemukan solusi yang lebih baik atas isu-isu vital yang *bersifat low politics* seperti lingkungan, transportasi, dan pengelolaan sumber daya air, yang dampaknya melampaui batas wilayah administratif namun tidak selalu memiliki signifikansi pada skala nasional. Dalam hal ini, pemerintah subnasional terdorong untuk menjalin kerja sama lintas negara karena persoalan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui mekanisme domestik semata (Kuznetsov, 2015).

1.6.1.2. Institusionalisasi Paradiplomasi

Institusionalisasi paradiplomasi merupakan proses formalisasi aktivitas hubungan internasional pemerintah subnasional melalui berbagai saluran kelembagaan yang konkret dan terorganisasi. Kuznetsov (2015) mengidentifikasi enam saluran utama institusionalisasi paradiplomasi, yaitu pembentukan kementerian atau departemen khusus urusan internasional, pembukaan kantor permanen di luar negeri, kunjungan resmi ke wilayah atau negara asing, partisipasi dalam pameran dan forum internasional, keterlibatan dalam jaringan multilateral regional lintas negara, serta partisipasi dalam delegasi resmi pemerintah pusat. Melalui saluran-saluran tersebut, aktivitas paradiplomasi tidak lagi bersifat *ad hoc*, melainkan terstruktur dalam kerangka kelembagaan yang memungkinkan pemerintah subnasional menjalankan hubungan internasional secara konsisten dan berkelanjutan.

1.6.1.3. Konsekuensi Paradiplomasi

Konsekuensi dari paradiplomasi dipahami sebagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas hubungan internasional pemerintah subnasional terhadap kebijakan nasional maupun pembangunan lokal. Konsekuensi dari paradiplomasi terbagi menjadi dua yaitu rasionalisasi dan demokratisasi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri. Rasionalisasi terjadi melalui penerapan prinsip subsidiaritas, di mana pemerintah pusat mendelegasikan urusan-urusan tertentu kepada pemerintah subnasional yang dinilai lebih mampu menanganinya secara

efektif di tingkat lokal. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Soldatos dan Atkey yang menyatakan bahwa segmentasi aktor dan kebijakan dalam hubungan internasional justru mendorong rasionalisasi pembuatan kebijakan luar negeri, karena pemerintah subnasional sering kali memiliki pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang lebih relevan untuk menangani isu-isu tertentu dibandingkan pemerintah pusat (Kuznetsov, 2015).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Motif Paradiplomasi

Dalam penelitian ini, motif paradiplomasi yaitu *cross-border housekeeping* dioperasionisasikan sebagai identifikasi kebutuhan fungsional yang mendorong keterlibatan PDAM Tirta Moedal dalam Program WaterWorX sebagai bentuk kerja sama lintas negara. Aspek ini diidentifikasi melalui persoalan struktural pengelolaan air yang dihadapi PDAM dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme domestik semata. Melalui aspek inilah kemudian dapat ditelusuri mengapa PDAM terdorong untuk menjalin kerja sama pembangunan internasional dengan VEI Dutch Water Operator dalam kerangka Program WaterWorX.

1.6.2.2. Institusionalisasi Paradiplomasi

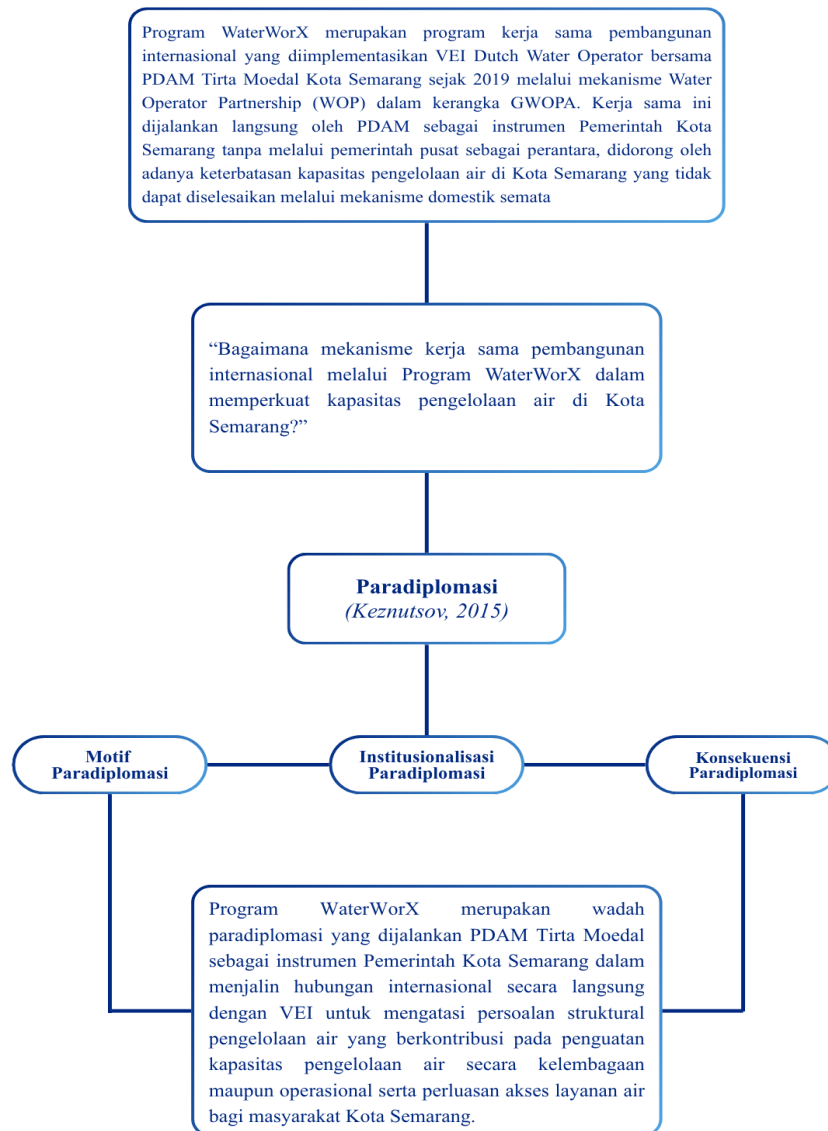
Institusionalisasi paradiplomasi dalam penelitian ini dioperasionisasikan melalui identifikasi saluran-saluran kelembagaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program WaterWorX. Aspek ini mencakup formalisasi kerja sama, kunjungan resmi, serta keterlibatan

dalam jaringan multilateral yang memungkinkan aktivitas paradiplomasi PDAM Tirta Moedal berlangsung secara terstruktur dan berkelanjutan. Dengan demikian, aspek ini digunakan untuk melihat bagaimana proses paradiplomasi PDAM Tirta Moedal dijalankan secara kelembagaan melalui Program WaterWorX.

1.6.2.3. Konsekuensi Paradiplomasi

Dalam penelitian ini, konsekuensi paradiplomasi dioperasionisasikan melalui identifikasi dampak yang dihasilkan dari aktivitas internasional melalui Program WaterWorX terhadap kapasitas pengelolaan air di Kota Semarang. Aspek ini digunakan untuk melihat sejauh mana proses paradiplomasi yang dijalankan berkontribusi pada penguatan kapasitas kelembagaan dan operasional layanan air bagi masyarakat Kota Semarang.

1.6.3. Bagan Alur Kerangka Berpikir



Gambar 1.1. Bagan alur kerangka berpikir penelitian

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa Program WaterWorX merupakan sebuah wadah paradiplomasi yang dijalankan PDAM Tirta Moedal sebagai instrumen Pemerintah Kota Semarang dalam menjalin hubungan internasional secara langsung dengan mitra asing untuk mengatasi persoalan struktural pengelolaan air

yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme domestik semata. Melalui proses paradiplomasi tersebut, Program WaterWorX berkontribusi pada penguatan kapasitas pengelolaan air PDAM Tirta Moedal secara kelembagaan maupun operasional, serta perluasan akses layanan air bagi masyarakat Kota Semarang secara berkelanjutan.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Mas'ood (1990) adalah praktik bagaimana cara memperoleh dan memahami data atau fakta yang dicari dengan berbagai cara seperti penggunaan data, dokumen, dan wawancara, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami makna baik individu maupun kelompok berdasarkan masalah sosial yang ada (Creswell, 2014). Pemilihan pendekatan ini bertujuan agar dapat memahami objek penelitian secara mendalam melalui proses pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi makna dari data yang diperoleh (Imam Gunawan, 2015). Dalam hal ini, pendekatan tersebut bertujuan untuk memahami secara mendalam proses paradiplomasi melalui Program WaterWorX dalam memperkuat kapasitas pengelolaan air di Kota Semarang. Selain itu, pendekatan ini juga didasarkan pada teori paradiplomasi guna menjelaskan bagaimana aktivitas internasional pemerintah subnasional dijalankan melalui saluran kelembagaan dan pola interaksi antaraktor lintas negara.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti (Moleong, 2017). Dengan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses paradiplomasi melalui Program WaterWorX yang diimplementasikan di tingkat lokal, khususnya dalam konteks penguatan kapasitas pengelolaan air PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memahami proses, motif, institusionalisasi, dan konsekuensi paradiplomasi yang dijalankan dalam program tersebut.

1.8.2. Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis bentuk kerja sama program WaterWorX dalam penguatan kapasitas pengelolaan air di Kota Semarang, penulis menggunakan situs penelitian secara *desk research* yang berlokasi di Kota Semarang. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan salah satu pejabat pelaksana Program WaterWorX di Kota Semarang guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses paradiplomasi yang dijalankan PDAM Tirta Moedal sebagai instrumen Pemerintah Kota Semarang melalui Program WaterWorX. Selain itu, pengumpulan data juga dilengkapi dengan penggunaan sumber daring dan luring, seperti dokumen resmi WaterWorX, laporan program, publikasi lembaga terkait,

serta literatur akademik yang berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat dan memverifikasi hasil wawancara.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah PDAM Tirta Moedal selaku instrumen Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan paradiplomasi melalui Program WaterWorX sebagai bentuk kerja sama pembangunan internasional dengan VEI Dutch Water Operator untuk penguatan kapasitas pengelolaan air di Kota Semarang.

1.8.4. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber asli melalui proses pengumpulan data seperti pengukuran, penghitungan, penyebaran angket, observasi, wawancara, atau teknik pengumpulan data lainnya (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara sebagai sarana mendapatkan data untuk informasi yang akan digunakan.

Data selanjutnya yang digunakan sebagai pendukung dari data primer adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh peneliti (Hasan, 2002). Data ini meliputi dokumen resmi WaterWorX, website resmi VEI Dutch Water Operator dan PDAM Tirta Moedal, serta literatur akademik berupa jurnal dan buku yang mendukung landasan teoritis dan analisis.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan data primer melalui wawancara narasumber dengan salah satu pejabat dari VEI Dutch Water Operator, yaitu Thomas de Jong, selaku *Project Manager* dari program WaterWorX. Dalam wawancara tersebut, penulis menggali informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mekanisme kerja sama antara VEI Dutch Water Operator dan PDAM Tirta Moedal. Selain itu, pertanyaan juga diarahkan pada implementasi dan implikasi dari program WaterWorx.

Dalam mendukung data primer, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai dokumen dan literatur yang tentunya kredibel dan relevan dengan fokus penelitian. Adapun sumber-sumbernya seperti dokumen resmi WaterWorX, publikasi dari website VEI Dutch Water Operator, website PDAM Tirta Moedal, dan jurnal serta buku seperti tulisan Kuznetsov (2015), dan tulisan lainnya yang digunakan sebagai dasar kerangka konseptual. Selain itu, artikel ilmiah dan laporan media terpercaya turut digunakan sebagai pelengkap informasi dalam mendeskripsikan kondisi faktual pengelolaan air di Kota Semarang.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah penting dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data (Sugiyono, 2012). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan

melalui wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Penulis tidak hanya mengumpulkan data dari narasumber, tetapi juga menggunakan berbagai bahan tertulis yang bersumber dari buku, artikel jurnal, dokumen resmi, berita, serta laporan kebijakan yang dapat diakses secara publik. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis dengan memilih data yang paling relevan dengan fokus penelitian, baik dari segi waktu, kredibilitas, maupun keterkaitan substansi terhadap kasus yang dikaji.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kongruen atau *Congruence Analysis Method* yang digunakan untuk menemukan relevansi antara bukti empiris dengan teori yang digunakan (Blatter & Haverland, 2012). Metode ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana konsep dan asumsi dalam teori paradiplomasi relevan dalam menjelaskan Program WaterWorX sebagai bentuk paradiplomasi yang dijalankan PDAM Tirta Moedal selaku instrumen Pemerintah Kota Semarang.

1.8.8. Kualitas Data

Untuk menjamin kualitas data, penelitian ini menerapkan prinsip validitas isi (*content validity*) sebagai dasar evaluasi atas ketepatan data yang digunakan (Haynes et al., 1995). Selain itu, penulis juga menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai dokumen dan publikasi atau sudut pandang yang berbeda namun membahas topik yang sama, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat otentik dan kredibel. (Sugiyono, 2012).